



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)
UNIT KERJA : AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LAODE NUSRIADI
2. Jabatan : AUDITOR UTAMA
3. NHK : 198429

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.789.034.000
1. Tanah Seluas 107 m ² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 199.234.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 393 m ² /238 m ² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000		
3. Tanah Seluas 2904 m ² di KAB / KOTA KONAWE SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000		
4. Tanah Seluas 1878 m ² di KAB / KOTA KONAWE SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 159.800.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	140.000.000
1. MOBIL, NISSAN X-TRAIL MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000		
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
3. MOTOR, HONDA CBR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000		
4. MOBIL, BMW SEDAN Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	130.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.072.476.184
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	5.131.510.184

**III. HUTANG****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

5.131.510.184

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.